

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pembangunan dan kemasyarakatan harus sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan. Penerapan otonomi daerah dengan payung hukum Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan daerah dari mulai Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota termasuk desa sebagai lembaga pemerintahan terkecil di bawahnya.

Desa secara eksplisit dipaparkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 mulai dari pasal 200 sampai dengan pasal 216 yang memuat berbagai ketentuan. Terdapat enam bagian dari Bab XI titel desa, yaitu tentang Bagian Umum, Bagian Pemerintah Desa, Bagian Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bagian Lembaga Lain, Bagian Keuangan Desa, dan Bagian Kerja Sama Desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas untuk membantu tugas-tugas kepala desa menurut bagian-bagiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Dinamika pembangunan senantiasa membawa aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat desa tersebut dilandasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Penilaian masyarakat

merupakan faktor penting dalam peningkatan kinerja pemerintahan desa menuju arah pembangunan yang lebih baik. Dalam pembangunan yang makin kompleks sekarang ini, aparat pemerintahan desa dituntut untuk dapat memikirkan masalah-masalah pembangunan yang dihadapi serta mencari jalan keluar terbaik dari masalah tersebut, menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Kinerja pemerintahan desa menjadi bagian yang paling penting bagi kemajuan serta perkembangan pelaksanaan proses pembangunan desa. Kinerja menjadi indikator awal berhasil tidaknya seorang kepala desa dan perangkatnya dalam melaksanakan tugas. Hal ini dapat diukur melalui keberhasilan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan dalam pemerintahannya. Implikasi atau dampak yang cukup jelas dari kinerja pemerintahan desa dapat diaktualisasikan ketika dihadapkan pada suatu persoalan, termasuk merupakan fenomena dengan berbagai pandangan dari masyarakat.

Menurut modul pendidikan dan pelatihan fungsional bagi penyuluh pertanian (STTP 2010 :10), menyebutkan bahwa:

“Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Namun proses tersebut tidak berhenti di situ saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf otak sebagai pusat susunan saraf dan proses itu selanjutnya merupakan proses persepsi”.

Berdasarkan pengertian di atas, persepsi mencakup penerimaan stimulus (*inputs*), sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri.

Senada yang diungkapkan oleh Atkinson dan Hilgard (1991 : 209), yang menyebutkan bahwa:

“Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat kompleks, stimulus masuk ke dalam otak, kemudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi”.

Sikap kritis masyarakat harus dilakukan agar kinerja pemerintahan desa dapat berjalan sesuai yang diamanatkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sepertinya hal ini perlu kita hargai ketika masyarakat mempersepsi dan memberi pandangan tentang kinerja pemerintahan desa. Tetapi tidak sedikit pula masyarakat yang memilih sikap diam, untuk mencari rasa aman tanpa harus ikut campur dalam politik praktis yang dilakukan oleh pemerintahan desa. Namun, yang dikhawatirkan dari sikap diam ini adalah semata-mata karena yang bersangkutan tidak memiliki penghayatan terhadap persoalan tertentu yang terjadi di sekitarnya.

Kecenderungan sikap apatisme masyarakat telah mematikan potensi atau daya kritik terhadap pemerintahan. Bahkan kondisi seperti ini akan menimbulkan pengesahan bahwa semua yang dilakukan pemerintahan desa adalah benar, tidak ada yang keliru dengan pemerintah. Bersikap menghargai perbedaan agaknya masih menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. Terlebih menyangkut perbedaan pendapat dan penilaian terhadap suatu objek. Tetapi yang ditakutkan dari sikap ini adalah ketika muncul pendapat yang berseberangan dengan pemerintah, akan menimbulkan konflik.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, pandangan atau persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa sangat diperlukan untuk mengkondisikan masyarakat menuju arah perbaikan dalam semua tatanan kehidupan mereka. Penilaian kinerja pemerintahan desa, serta aspirasi dan harapan masyarakat pun termasuk didalamnya. Hal itu dikarenakan masyarakat hanya menginginkan

bagaimana desa tersebut bisa maju, rakyat makmur tanpa masyarakat harus ikut berpartisipasi secara langsung.

Dalam ilmu sumber daya manusia, kinerja dikenal dengan macam-macam nama yang mempunyai makna yang hampir sama, diantaranya prestasi kerja.

Anwar Prabu Mangkunegara (2001:67), menyatakan bahwa:

“Istilah kinerja berasal dari kata *Job Performance* atau *Actual Performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Sesuai pengertian di atas, penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan suatu lembaga secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang baik akan berdampak baik pula terhadap lembaga tersebut. Veithzal Rivai (2008:309) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan penilaian kinerja adalah:

"Suatu penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat kehadiran".

Penilaian kinerja pemerintahan desa sangat bermanfaat bagi perbaikan pembangunan masyarakat desa, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi yang sebenarnya tentang bagaimana kinerja pemerintahan desa.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan melalui keefektifan, keefesian, dan produktifitas yang dihasilkan dari sebuah kebijakan yang dibuat. Wida Yanti (2005:105) telah melakukan penelitian dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa”. Adapun kesimpulan dari penelitiannya bahwa kinerja pemerintah desa

dalam melaksanakan program pembangunan desa belum secara optimal melaksanakan kinerjanya.

Menurut kesimpulan di atas, Wida Yanti (2005:105) juga menjelaskan “belum optimalnya kinerja pemerintahan desa disebabkan oleh kurangnya sikap kritis aparat pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya serta tingkat kedisiplinan aparat desa yang masih rendah”. Seharusnya pelaksanaan otonomi daerah pada program peningkatan kinerja pemerintahan desa khususnya dalam perencanaan pembangunan desa diimplementasikan dalam bentuk peran serta aparat pemerintahan desa, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam menjalankan program kerja.

Berkenaan dengan hal di atas Widjaja (2001:49-50), mengatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya kepala desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa setelah melalui teguran dan atau peringatan”.

Senada dengan hal di atas Widjaja (2001:50) mengatakan bahwa “kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD”. Sejauh ini keberadaan BPD di Desa Ciloto telah memiliki paradigma yang jelas berpegang teguh pada konstitusi, serta independen dalam melakukan fungsi dan perannya, namun masyarakat belum begitu sepenuhnya mengetahui peran dari adanya BPD ini.

Berikut ini adalah salah satu contoh bukti kinerja yang dilaksanakan pemerintahan Desa Ciloto yang datanya diperoleh penulis saat melakukan pra penelitian dalam upaya pemajuan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa.

Tabel 1.1
Program Pembangunan yang Dilaksanakan Desa Ciloto
Periode 2009-2010

No.	Jenis Program	Tempat	Alokasi Biaya	Keterangan
1.	Pembangunan jalan lingkungan	Kp. Cinyawar Rt 04/02	Bantuan dan Swadaya	Terealisasi
2.	Pembangunan Posyandu	Kp. Puncak Rt 04/01	Bantuan dan swadaya	Terealisasi
3.	Pengadaan sarana air bersih	Kp. Parabon Pojoek Rt 04/03	Bantuan dan Swadaya	Terealisasi
4.	Pembangunan MCK umum	Kp. Geger Bentang Rt 05/03	Bantuan dan swadaya	Sedang dilaksanakan
5.	Pembuatan Drainase	Kp. Puncak Rt 01/01	Bantuan dan swadaya	Terealisasi
6.	Pembangunan jalan Desa	Kp. Puncak Rt 02-03/01	Swadaya	Sedang dilaksanakan

Sumber : Data Topografi Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur tahun 2009-2010.

Bertolak dari pemahaman-pemahaman yang telah dipaparkan di atas, terlihat jelas bahwa pandangan atau persepsi masyarakat sangat dibutuhkan karena pemerintahan desa memiliki kecenderungan peran yang cukup vital dalam menjalankan kinerjanya. Maka dengan demikian peneliti mengambil judul:

“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KINERJA PEMERINTAHAN DESA” (*Studi Deskriptif Analitis terhadap Pemerintah Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah Persepsi Masyarakat tentang Kinerja Pemerintahan Desa?”.

Menyadari masih begitu luasnya rumusan masalah tersebut, maka dirasakan perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang pengetahuan yang dimiliki aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang keterampilan yang dimiliki aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya?
3. Bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang sikap yang ditunjukkan aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, khususnya dalam melayani masyarakat?
4. Bagaimanakah persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang situasi kerja yang diciptakan aparat pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya?
5. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi aparat pemerintahan Desa Ciloto dalam pelaksanaan pembangunan desa?
6. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa Ciloto dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang pengetahuan yang dimiliki aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang keterampilan yang dimiliki oleh aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
3. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang sikap yang ditunjukkan aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, khususnya dalam melayani masyarakat.
4. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang situasi kerja aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
5. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi aparat pemerintahan Desa Ciloto dalam pelaksanaan pembangunan desa.
6. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa Ciloto dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sesuatu yang berguna dalam tataran teoritis bagi pengembangan keilmuan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penulis juga berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memperkaya fakta-fakta dan teori tentang kinerja pemerintahan desa, selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

bagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sistem pemerintahan daerah, sistem pemerintahan desa, manajemen sumber daya manusia (MSDM), dll.

2. Secara Praktis

- a. Diketuainya persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang pengetahuan yang dimiliki aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- b. Diketuainya persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang keterampilan yang dimiliki aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- c. Diketuainya persepsi masyarakat Desa Ciloto tentang sikap yang ditunjukkan aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, khususnya dalam melayani masyarakat.
- d. Diketuainya persepsi masyarakat Desa Ciloto terhadap situasi kerja aparat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
- e. Diketuainya hambatan-hambatan yang dihadapi aparat pemerintahan Desa Ciloto dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- f. Diketuainya upaya yang harus dilakukan oleh aparat pemerintahan Desa Ciloto dalam menanggulangi hambatan-hambatan tersebut.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah tersebut.

Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persepsi

a). Pengertian Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2002:87), mengartikan persepsi sebagai “suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensorik”.

Sedangkan Jalaluddin Rakhmat (1986:57-58), mempunyai pendapat lain mengenai pengertian persepsi.

“Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (*sensory stimulus*). Hubungan sensasi dengan persepsi sudah jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi”.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis mengambil salah satu alasan mengapa persepsi sangat penting dalam hal menafsirkan lingkungan sekeliling kita adalah bahwa kita masing-masing mempersepsi secara berbeda apa yang dimaksud dengan sebuah situasi.

b). Faktor yang Berperan dalam Persepsi

Berkaitan dengan faktor-faktor yang berperan persepsi Bimo Walgito (2002:89), mengemukakan beberapa faktor, diantaranya adalah: 1). Objek yang dipersepsi; 2). Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf; 3). Perhatian.

Menurut Miftah Thoha (2007:147), menyebutkan adapun “faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan persepsi seseorang”, antara lain:

a. Psikologis

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di alam dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologis

b. **Famili**

Pengaruh yang paling besar terhadap anak-anak adalah familinya, orang tua yang telah mengembangkan suatu cara yang khusus dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

c. **Kebudayaan**

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

c). **Proses Terjadinya Persepsi**

Menurut Walgito, (2004:90). Proses terjadinya persepsi yaitu objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Antara stimulus dan objek itu berbeda, tetapi ada kalanya bahwa objek dan stimulus itu menjadi satu, yaitu dalam hal tekanan, benda sebagai objek langsung mengenai kulit, sehingga akan terasa tekanan tersebut.

2. Pemerintahan Desa

Menurut PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (2003:3), memberikan definisi tentang desa yaitu:

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri menurut kehendaknya, tetapi dalam penyelenggaraannya desa tidaklah bebas sepenuhnya.

Mengenai fungsi Pemerintah Desa menurut PP No. 72 tahun 2005 tentang

Desa adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
- b. Pelaksanaan perekonomian masyarakat desa;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa dan;
- e. Penyusunan pengajuan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa.

Pada dasarnya fungsi dari pemerintahan desa ini adalah untuk membuat suatu pemerintahan yang sadar pada kondisi masyarakatnya.

3. Pengertian Kinerja

Mengenai pengertian kinerja Veithzal Rivai (2005:14) mengemukakan pendapatnya, kinerja merupakan :

“Hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam (Anwar Prabu Mangkunegara, 2005:67) yang merumuskan bahwa:

- a. $Human\ Performance = Ability + Motivation$
- b. $Motivation = Attitude + Situation$
- c. $Ability = Knowledge + Skill$

Keanekaragaman tujuan penilaian sering menggambarkan variasi tujuan yang berbeda tentang penilaian kinerja. Veithzal Rivai (2005:51) mengatakan beberapa alasan mengapa perlu adanya penilaian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian memberikan informasi tentang dapat dilakukannya promosi dan penetapan gaji

- b. Penilaian memberikan satu peluang bagi manajer dan karyawan untuk meninjau perilaku yang berhubungan dengan kerja bawahnya
- c. Memungkinkan atasan dengan bawahan bersama-sama mengembangkan suatu rencana untuk memperbaiki kemerosotan apa saja yang mungkin sudah digali oleh penilaian dan mendorong hal-hal baik yang sudah dilakukan bawahnya.

Tolak Ukur Kinerja Pemerintahan Desa, Kinerja pegawai dapat diketahui dengan cara meneliti penampilan kerja dan hasil yang diperolehnya. Kinerja pegawai adalah modal yang dapat menunjang terhadap kesuksesan yang akan dicapai pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. kinerja merupakan fungsi dari motivasi yang dapat dilihat dan ditentukan dari kemampuan dan motivasi.

F. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) mengemukakan bahwa:

“Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Sifat kualitatif yang ada dalam penelitian ini mengharuskan peneliti menjadi instrumen utamanya untuk terjun langsung ke lapangan dalam rangka mencari data atau informasi melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, penulis lebih menggunakan pendekatan antar manusia. Hal ini berarti selama proses penelitian, penulis akan lebih banyak mengadakan hubungan dengan orang-orang di tempat penelitian.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa. Dalam penelitian ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan konseptual.

Dengan Demikian penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis terhadap masalah yang sedang dikaji oleh penulis, karena masalah tersebut berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang.

G. Teknik Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini cukup variatif, antara lain :

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi, kita memperoleh gambaran yang jelas tentang kehidupan sosial yang sulit diperoleh dengan metode lainnya. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta berupa persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintahan desa.
2. Wawancara menurut Esterberg (Sugiyono, 2009:317) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Studi Dokumentasi, merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Arikunto (1998:236) mengatakan bahwa “metode dokumentasi merupakan salah satu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya”. Data yang diperoleh dari studi dokumen dapat menjadi narasumber bagi peneliti selain wawancara dan observasi.
4. Studi Literatur, yaitu Studi literatur merupakan alat pengumpul data untuk mengungkapkan berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang dapat mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai literatur baik berupa buku maupun artikel-artikel dari media masa atau internet.

H. Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tergolong penelitian kualitatif, maka subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara *purposive* dan *snowball* berkaitan dengan tujuan penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah aparat pemerintahan Desa Ciloto, sebagian masyarakat sebagai sumber, dan tokoh masyarakat Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Lokasi penelitian ini adalah Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur.